



Bukti Acara Pemeriksaan Kepolisian sebagai Data Sejarah : Upaya Merekonstruksi Kekerasan Banyuwangi Tahun 1998-1999

Latif Kusairi

UIN Raden Mas Said Surakarta

latifkusairi2018@gmail.com

Submitted: 09 Juli 2021	Revision Required: 15 Agustus 2021	Published: 21 Agustus 2021
----------------------------	---------------------------------------	-------------------------------

Abstract

Writing a history of violence often encounters obstacles in finding data. This is due to the concern and silence of the perpetrators to reveal the chronology of historical events. The process of searching for archived data is sometimes also not found in archival institutions. In the other hand, historians are not yet very familiar with the data obtained from the authorities. The history of violence reconstruction with the issue of dukun santet in Banyuwangi is also the same. Investigation the data found many obstacles such as historical actors who do not want to tell incidents that happened. The role of the police archives and the court is very important, because in the minutes of the examination and the news of the court has been written. Historians need to view the archives of the court as an alternative when historians have difficulties in finding the data. At this point historians must be able to pick up archives not only fixated on archival institutions, but can look for the archives through institutions such as courts to see the chronology of violence that has occurred and has been tried in judicial institutions. Historians can go further for data analysis and can see the results of interviews conducted by the judiciary. This study will discuss the role of historians in seeking data from the court as a primary source.

Keywords: *archive, violence, court, santet banyuwangi*

Abstrak

Menulis sejarah kekerasan seringkali menemui kendala dalam pencarian data. Hal ini disebabkan adanya kekhawatiran dan bungkamnya para pelaku untuk mengungkapkan kronologi tentang peristiwa sejarah. Proses pencarian data arsip kadang kala juga tidak banyak ditemukan di lembaga arsip. Di sisi lain, para sejarawan belum begitu familiar terhadap data yang didapat dari pihak berwajib. Rekonstruksi sejarah kekerasan dengan isu dukun santet di Banyuwangi pun juga demikian. Penelusuran data banyak ditemukan kendala seperti pelaku sejarah yang tidak mau menceritakan peristiwa yang terjadi. Peran arsip dari kepolisian dan pengadilan sangat penting, karena dalam berita acara pemeriksaan dan berita pengadilan sudah tertulis. Sejarawan perlu untuk melihat arsip dari pengadilan sebagai salah satu alternatif manakala sejarawan kesulitan dalam mencari data. Pada poin inilah sejarawan harus bisa menjemput arsip tidak hanya terpaku pada lembaga arsip saja, tetapi bisa mencari arsip melalui lembaga seperti pengadilan untuk melihat kronologi dari kekerasan yang terjadi dan sudah diadili di lembaga peradilan. Sejarawan bisa bertindak lebih jauh untuk analisis data dan bisa melihat hasil wawancara yang sudah dilakukan oleh lembaga peradilan. Kajian ini akan membahas tentang peran sejarawan dalam melakukan pencarian data yang berasal dari pengadilan sebagai sumber primer.

Kata Kunci: *arsip, kekerasan, pengadilan, santet banyuwangi.*

PENDAHULUAN

Pada 23 April 1999 di Jalan Adi Sucipto Nomor 26, Kota Banyuwangi terlihat ramai oleh orang-orang dari pedesaan di Banyuwangi. Mereka ke kota bukan untuk ke pasar ataupun demo besar-besaran layaknya yang pernah terjadi menjelang lengsernya Presiden Suharto pada Mei 1998. Mereka datang berbondong-bondong tidak lain adalah untuk mendengarkan eksepsi persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Banyuwangi yang memang berada di alamat tersebut. Layaknya pengadilan yang selalu menyidangkan kasus pidana dan perdata, pengadilan kelas 1B ini ramai didatangi oleh warga dari pelosok desa di Banyuwangi, tak lain dan tak bukan karena yang disidangkan adalah mereka yang diduga melakukan kekerasan dengan dalih pembunuhan dukun santet. Hal inilah yang terjadi antara bulan Desember 1998 sampai Agustus 1999, PN Banyuwangi selalu ramai karena banyak menyidangkan kasus pembunuhan dengan isu dukun santet yang

memang sempat membuat heboh kabupaten di *ujung timur* Pulau Jawa, bahkan menjalar ke wilayah lainnya sampai ke seluruh Jawa. Hal yang tak kalah repotnya adalah para pegawai PN Banyuwangi, terkait perkara pembantaian itu, mereka terpaksa mempersiapkan segala hal secara terstruktur. Soal pengamanan, misalnya, PN Banyuwangi berkoordinasi dengan aparat keamanan setempat, untuk menjaga kemungkinan terburuk. Karena sidang ini pasti menarik perhatian masyarakat setempat (Abdul Manan: 1999).

Kali ini peradilan yang dijadwalkan cukup menyita perhatian, yaitu kasus pembunuhan Djamuri, petani yang kesehariannya sebagai guru ngaji di dusun Patoman desa Watukebo. Sidang dimulai pukul 10.00 WIB, tetapi sejak pagi orang-orang yang kebanyakan berasal dari desa Watukebo ini sudah datang. Sidang akan dibuka oleh Hakim yang pada saat itu diketuai oleh Pak Made, setelah itu baru mendengarkan beberapa kesaksian dan pembacaan Berita Acara Pemeriksaan BAP. Dalam kesaksiannya, Usnan anak dari Djamuri menuturkan bahwa ayahnya pernah diduga sebagai orang yang mempunyai ilmu santet. Akan tetapi kejadian 6 bulan sebelum pembunuhan, korban telah melakukan sumpah Al - Qur'an bahwa dirinya tidak punya ilmu santet. Persoalan kepemilikan dan rasa curiga dari warga pun mulai menghilang setelah diadakan sumpah untuk memperkuat pengakuan. Upaya pengusiran Djamuri dari desanya pun diurungkan oleh warga karena sumpah Al – Qur'an dianggap sebagai pernyataan yang cukup menguatkan pengakuannya bahwa Djamuri tidak mempunyai ilmu santet.

Pengadilan pun menghadirkan terdakwa Sapi'i yang diduga membunuh Djamuri. Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibacakan Jaksa Penuntut, bahwa persoalan Djamuri tidak berhenti pada sumpah Al – Qur'an saja. Upaya persidangan adat terhadap Djamuri sebenarnya telah dirancang oleh warga sekaligus tetangganya yaitu Nurmal dan Jamilah. Pada waktu itu Djamuri pernah diinterogasi oleh warga atas tuduhan sebagai dukun santet. Dalam tuduhan tersebut, Djamuri pernah menyantet Saroni atas suruhan Ja'ani dengan imbalan 4.000 rupiah (Arsip Pengadilan Banyuwangi no P-42). Atas pengakuan itu, Djamuri sempat diusir oleh warga. Tradisi masyarakat Banyuwangi ketika ada dukun santet yang mengakui perbuatannya, maka hukumannya adalah diusir dari desanya. Akan tetapi, setelah

setahun keluar dari Patoman, Djamuri kembali lagi ke desa tersebut. Kembalinya Djamuri ke Dusun Patoman pada awalnya tidak ada masalah bagi warga, bahkan Djamuri memperlihatkan perilaku baik dengan menjadi guru ngaji di kampung. Muridnya pun juga banyak, sekitar 50-an anak yang tiap sore mengaji dengannya di sebuah mushala dekat rumahnya. Kehidupan Djamuri pun menjadi lebih baik dengan tetangganya dan ia suka membantu para tetangga baik dalam urusan di pertanian ataupun hajatan. Layaknya di kampung, Djamuri juga membantu setiap ada kegiatan keagamaan, adzan di mushala ketika waktunya salat sampai urusan bantuan keuanganpun sering ia lakukan (Arsip Pengadilan Banyuwangi no P-42).

Pada bulan Juli-September 1998, Banyuwangi digoncang oleh isu pembunuhan dukun santet. Isu ini juga melanda dusun kecil seperti Patoman. Luka lama kemudian diungkit kembali, dan ternyata pada kasus yang telah lama berlalu, bahwa di dusun tersebut pernah terjadi pengusiran terhadap dukun santet yaitu Djamuri. Awalnya ada orang yang datang ke desa itu untuk menanyakan perihal dukun santet. Jumadi dan Darno yang merupakan warga Dusun Patoman mengiyakan adanya kasus dukun santet setahun yang lalu. Pada saat itu orang yang tidak dikenali oleh Jumadi menghasut bahwa dukun santet merupakan *boom* waktu yang akan membunuh warga dan menyebabkan ketidaktertaman warga. Ditambah dengan adanya provokasi bahwa dukun santet adalah orang yang tidak beragama atau bisa disebut komunis. Oleh karenanya, orang yang disangka dukun santet harus dibunuh, sebelum sang dukun melakukan aksi dengan kekuatan mistis. Lebih lanjutnya, provokasi dari orang misterius itu juga menghubungkan adanya dukun santet dengan bangkitnya PKI sehingga sebelum dukun menyerang warga dengan ilmu magis, sebaiknya si dukun dibunuh terlebih dahulu (Wawancara *Ainur Rofiq*: 8 Mei 2014). Menurutnya kasus pembunuhan dukun santet di Banyuwangi pada awalnya didahului dengan adanya isu kebangkitan PKI yang kemudian dilabelkan kepada para dukun santet, sehingga pada masa itu warga yang emosi terhadap isu kemunculan kembali terpancing untuk membunuh para dukun yang di anggap akan bisa membahayakan keselamatan warganya karena adanya kemunculan PKI lagi. Disisi lain, isu PKI paling ampuh untuk menghasut warga agar terpecah pecah sehingga seakan ini merupakan konflik antara NU vs

PKI yang berkembang lagi (Lakpesdam NU Banyuwangi 2012-2016). Proses rekonsiliasi antara NU dg eks PKI yang belum tuntas kemudian menyebabkan isu ini gampang dimainkan oleh pihak yang ingin mengacaukan Banyuwangi. Kasus pembunuhan di Patoman ini merupakan aksi yang diketahui informan yang berawal dari isu kemunculan PKI. Dengan alasan itu kemudian Jumadi yang sudah terprovokasi memberitahukan kepada warga lain dan upaya untuk membunuh Djamuri dengan meyisipkan alasan sesuai yang dituturkan orang misterius.

Pada kamis malam tanggal 3 September 1998 jam 21.00 WIB, sesuai kesepakatan warga berkumpul di jalan desa yang tidak jauh dari rumah Djamuri. Di tengah perjalanan itu dilakukan pembagian tugas oleh Jumadi yang merasa tersakiti dan mendapat provokasi dari seseorang. Anehnya pada waktu itu juga hadir orang-orang yang tidak dikenalnya yang ingin membantu untuk melakukan pembunuhan. Orang dari luar desa inilah yang kemudian disebut *Gantung* atau massa bayaran atas nama gerakan anti-*tenung*. Setelah intruksi dari Jumadi selesai, massa bergerak ke rumah Djamuri dan mengepungya. Ada himbauan untuk mematikan lampu dengan mematikan saklar listrik di rumah Djamuri dan di rumah tetangganya. Seketika itu rumah Djamuri didobrak dan korban dipukuli sambil dibawa ke belakang rumahnya. Djamuri yang tidak berdaya terus dipukuli, ada juga yang mencluritnya bahkan sampai batu kali dihantamkan ke kepalanya. Seketika pada saat itu Djamuri meninggal dunia. Massa yang belum puas atas kematian korban, kemudian menggantungnya di pohon *bayur* menggunakan tali plastic (Arsip Pengadilan Negeri Banyuwangi no P-42 tentang Surat Tuntutan atas Terdakwa Sapi,i No. Reg.Perkara: PDM-473/EPO/BWNGI/02.09.

Mardiyah yang merupakan istrinya menuturkan bahwa ada semacam pembunuhan yang sadis, bahkan ia tidak tega untuk melihat jasad suaminya. Keesokan harinya, tetangganya pun merasa enggan untuk melayatnya dan menguburnya, hingga proses pemakaman hanya dilakukan beberapa orang, yang sebagian besar adalah kerabat korban. Tindakan pihak kepolisian waktu itu hanya meminta untuk segera menguburkan korban setelah ada visum dokter IB, Endrawan dari Pukesmas Gitik (Arsip Pengadilan Negeri Banyuwangi no P-42 tentang Surat Tuntutan atas Terdakwa Sapi,i No. Reg.Perkara: PDM-

473/EPO/BWNGI/02.09)

Pada bulan Oktober bebarengan dengan penyidikan beberapa kasus pembunuhan, kasus pembunuhan di Patoman ini juga disidik oleh pihak kepolisian. Pada tanggal 16 Oktober 1998, kepolisian berhasil menangkap orang-orang yang ikut melakukan pembunuhan. Seperti Sapi'i yang ikut dalam pembunuhan itu, selain itu ada aktor pembunuh yaitu Jumadi dan Darno. Sedangkan warga yang ikut dalam pembunuhan lain dan ditangkap polisi adalah Warji, Kabul dan Misbah.

Peradilan pada hari itupun banyak menyita perhatian media massa, hal ini sangat menarik mengingat tidak hanya kasus Djamuri yang dihadirkan, bahkan berhari-hari PN Banyuwangi selalu menyidangkan atas kasus Santet. Dalam keterangannya di Pengadilan Negeri Banyuwangi, Sapi'i sebenarnya hanya ikut-ikutan saja. Sama seperti tetangga yang lainnya yaitu Warji, Kabul, Misbah dan beberapa tetangga lainnya yang melarikan diri sebelum ditangkap pihak kepolisian. Menurut warga, Djamuri telah mengganggu keseimbangan kehidupan dengan ilmu santetnya, sehingga untuk memperoleh ketenteramannya, salah satu jalannya adalah membunuh Djamuri. Pada dasarnya hubungan Sapi'i dengan korban juga baik, akan tetapi perasaan bertetangga atas pembunuhan dirasa untuk ketenteraman wargalah yang membuat Sapi'i ikut pada malam pembunuhan. Meskipun demikian, Sapi'i tetap dituntut hukum di PN Banyuwangi karena melakukan aksi main hakim sendiri. Dalam tuntutananya Sapi'i dijatuhi hukuman 4 tahun, begitu juga dengan tetangganya yang ikut membunuh Djamuri (Arsip Pengadilan Negeri Banyuwangi no P-42, *Juga* wawancara dengan Bambang Suhariyanto, 12 April 2014.) Meskipun demikian, Sapi'i hanya divonis hukuman 2 tahun oleh PN Banyuwangi.

Pada kasus pembunuhan Djamuri, bisa dikategorikan pola pembunuhan tidak murni dilakukan oleh warga setempat, akan tetapi dilakukan juga oleh massa bayaran yang mengatasnamakan *Gantung*. Selain itu, massa bayaran ini juga di dalamnya terdapat orang profesional yang terlatih yang sengaja membuat kekisruhan di Banyuwangi atau pada awal Oktober 1998 lebih tenar disebut *ninja*.

Ulasan di atas merupakan kronologis atas kekerasan yang terjadi di Banyuwangi atas pembunuhan Djamuri. Pola penulisan yang runtut dan disertai dengan bukti-bukti otentik ini hadir dan tercatat dalam hasil

sidang pembunuhan tersebut. Sebuah peristiwa yang dituliskan secara kronologis lewat pembuktian di PN Banyuwangi. Ulasan tersebut tentu bukanlah suatu kebenaran yang sifatnya tunggal dan bersifat mutlak, akan tetapi kronologis tersebut setidaknya bisa menjadi bagian dari pola penulisan sejarah. Terlebih tentang sejarah kekerasan yang kadang menemui jalan buntu dalam pencarian sumber, yang diakibatkan adanya ketakutan masyarakat untuk berbicara sesuai kebenarannya yang terekam dalam memori kolektif waktu itu.

Tulisan ini berusaha membahas bagaimana pola penggunaan sumber sejarah yang berasal dari pengadilan untuk menuliskan sejarah. Pertanyaan yang hendak dijawab adalah bagaimana kaitan antara penulisan sejarah dalam pencarian data sumber dari aparat keamanan untuk mengisi kekosongan data akibat masyarakat yang masih takut untuk mengungkapkan kejadian masa lalu akibat traumatis yang masih menghinggap.

PEMBAHASAN

Banyuwangi dalam Bungkus Traumatis

Pada rezim Orde Baru, terminologi kekerasan telah menjadi wacana publik, bahkan realitas sosial sehari-hari menunjukkan adanya kekerasan politik yang dilakukan oleh negara. Merujuk pada Deborah Barret dan Charles Kusman dalam *Globalizing social movement theory: the case of eugenics*, bahwa relasi antara gerakan massa dan negara seakan tidak terhubung secara langsung, yaitu bahwa masyarakat cenderung melihat kekerasan sebagai basisnya, sedang negara seakan menjadi pengadil saja (Deborah Barret dan Charles Kusman; 2004). Alhasil, kekerasan di wilayah lokal seperti Banyuwangi merupakan bagian dari pola yang ada dalam ranah nasional.

Fenomena kekerasan dilakukan oleh berbagai aparat negara yang “dibungkus” oleh ideologi dan hegemoni politik, sehingga kekerasan dianggap sah atas nama negara. Akibatnya, ketika ada korban kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat umum dengan mengatasmakan negara, yang terjadi adalah cemoohan massal terhadap para korban kekerasan. Labelisasi atas korban kekerasan kemudian turut dihadirkan, seperti dianggap sebagai komunis, *zaman jus-jusan*, *zaman petrus*, gerakan pengacau keamanan dan pengacau ketertiban masyarakat atau kriminal politik. Meskipun Orde Baru telah

berhasil ditumbangkan dengan gerakan Reformasi, akan tetapi pola labelisasi atas kekerasan masih saja terjadi. Kasus Banyuwangi merupakan salah satu contoh dari pola pelabelan atas nama dukun santet. Hal ini sesuai dengan konsep Charles Tilly bahwa kekerasan sebagai *reactionary collective violence* yaitu kekerasan karena ada isu yang kemudian ditanggapi secara reaksioner oleh masyarakatnya yang berkaitan dengan labelisasi. Meskipun kekerasan tidak serta-merta lahir begitu saja di tengah masyarakat yang mempunyai nilai tradisi kerukunan. Kadang kekerasan tersebut justru terjadi akibat adanya campur tangan orang luar. Teoritis ini biasanya sangat banyak terjadi di berbagai kekerasan yang berujung pada korban masyarakat yang tidak tahu-menahu terhadap persoalan akar kekerasan itu.

Masyarakat Banyuwangi dalam sejarahnya sering ada kekerasan yang menaunginya. Pada masa kerajaan Blambangan, masyarakat Banyuwangi dengan *puputan bayu* melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda, yang menyebabkan banyak masyarakat Blambangan tewas dan hanya menyisakan sedikit penduduk saja yang kini dinamakan suku Osing. Traumatis terhadap penjajah inilah yang kemudian menyebabkan masyarakat Osing tidak mau bersahabat dengan kolonial (Margana : 2004).

Terjadinya peristiwa G30 S/PKI dalam ingatan masyarakat Banyuwangi sangat membekas di memori kolektifnya, kejadian yang mempertentangkan antara PKI dan NU kemudian turut serta mengikutinya karena beberapa kasus. *Pertama*, munculnya lagu *genjer-genjer* karya budayawan Banyuwangi, M. Arif menyebabkan Banyuwangi dianggap daerah yang terus melawan pemerintah. *Kedua*, basis massa PKI di Banyuwangi relatif dominan dan menyebabkan banyak peristiwa kekerasan yang dilakukan PKI lewat beberapa peristiwa, seperti peristiwa Pancasila Jaya di Glagah. Hal inilah yang kemudian menyebabkan ada traumatis masyarakat dalam melihat beberapa peristiwa (Latif Kusairi: 2015).

Pada tahun 1993, ada pergeseran makna pasca G 30 S/PKI, ada pembunuhan terhadap dukun santet yang konon telah membunuh orang melalui ilmu magisnya. Faktor lain yang membuat santet Banyuwangi menjadi negatif karena adanya pola pembunuhan dukun santet yang ada di berbagai daerah, misalnya saja di Jember tahun 1981 tercatat 27 orang dituduh menjadi dukun santet dan dihakimi oleh

masyarakat. Di Sumatera juga terjadi pembunuhan orang-orang yang mempunyai ilmu sihir karena digunakan untuk membunuh, serta yang terbaru laporan bahwa antara Agustus 1990-Februari 1993 di Jawa Timur tercatat 30 orang dibunuh karena diduga dukun santet (Nicholas Herriman, t.t.). Hal itu menjadikan ilmu santet semakin lama diasumsikan sebagai ilmu yang bersifat negatif, yang menyebabkan budaya mistis seperti santet kemudian berubah menjadi negatif (Forum Keadilan, 2 November 1998). Wilayah Banyuwangi yang identik dengan ilmu santet untuk kebaikan lama-kelamaan menjadi terpengaruh dengan asumsi pandangan yang negatif tentang ilmu santet (Latif Kusairi: 2015. 201).

Munculnya kasus lain setelah isu santet, yaitu *Ninja* turut juga mempengaruhi warga. Koran *Republika* pada tanggal 1 Oktober 1998 memuat berita sensasional. Dalam pemberitaannya, ada anggapan bahwa orang-orang eks-Partai Komunis Indonesia (PKI) membayar orang-orang untuk membunuh sejumlah dukun santet di Banyuwangi (<http://www.nu.or.id/>, 03 Mei 2015). Padahal yang dibunuh adalah para guru ngaji NU, sehingga berita ini membuat penyesatan. Terlepas dari *headline* yang ditampilkan dalam berbagai koran, di Banyuwangi saat itu sangat mencekam.

Hari-hari pada bulan Oktober 1998 menjadi sebuah situasi yang mencekam di Banyuwangi. Tiap hari setelah maghrib kota ini menjadi sepi kendaraan, hanya satu dua saja yang melintas, bahkan kendaraan itu banyak didominasi dari aparat keamanan yang melakukan patroli tiap beberapa jam sekali. Begitupun juga desa- desa di Banyuwangi yang juga sepi akibat isu ini. Hanya ada orang yang berkerumun di sudut desa, jalan pintu masuk kampung, masjid dan rumah pemuka agama. Mereka tidak lain melakukan pengamanan atas orang-orang misterius yang konon bisa menghilang dan membunuh korbanya dalam waktu beberapa detik, orang misterius itu sering disebut "Ninja". Para pembunuh bukan lagi disebut pembunuh bertopeng, meskipun sama-sama berpenutup kepala layaknya ninja. *Ninja* bergerak tidak bergerombol layaknya pembunuh bertopeng, tetapi justru bergerak sendiri atau kelompok kecil antara 2-4 orang dengan sikap yang taktis. Selain mengantisipasi adanya *Ninja*, para pembunuh juga masih menggunakan modus *Gantung* untuk menyisir orang-orang yang

disangka sebagai dukun santet. Praktis aktivitas Banyuwangi pada malam hari mencekam, tanpa urat perekonomian ibarat kota mati.

Adanya sangkut paut antar kekerasan yang terjadi di Banyuwangi ini kemudian turut serta mempengaruhi masyarakat untuk bersuara. Diturunkan dalam upaya rekonsiliasi korban 1965 dan 1998 yang dilakukan oleh Lakspesdam NU bersama Sarekat Yogyakarta, ada salah satu peneliti yang sampai berbulan-bulan hidup di keluarga korban 1965 dan 1998, hanya ingin mencari data atas kekerasan yang pernah dialami korban tersebut (Daim Dimiyati: 2014). Hal ini cukup beralasan karena ingatan masyarakat terhadap peristiwa tersebut sangat membekas, sehingga untuk mendapatkan data dari wawancara sangat sulit. Oleh karenanya, perlu sumber alternatif dalam penulisan sejarah yang ada yaitu dengan menggunakan data tertulis melalui berita acara pengadilan.

Menelisik Peristiwa Kekerasan Lewat Peradilan.

Menurut Taufik Abdullah bahwa, kekerasan selalu identik dengan pola *vigilante*, yaitu bagian dari *sindrome of marginalization* yang telah menjangkiti masyarakat kelas bawah, setelah sekian lama selalu tersisih dan tidak pernah ditanggapi dalam mengadu. Ketika ada kesempatan terbuka melalui Reformasi, *moral outrage* (kemarahan akan moral) mereka keluar ke permukaan dan terjadi kekerasan massa. Aksi vigilantisme bisa terjadi ketika negara tidak hadir dan disitu masyarakat melakukan keadilan dengan caranya sendiri.

Salah satu aparat pemerintah yang paling tahu terhadap kasus kekerasan di pedesaan Banyuwangi adalah aparat desa. Selain bersentuhan langsung dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, hal itu didukung pula oleh perannya sebagai simbol perwakilan hukum dan wewenang negara yang paling rendah (Nicholas Herriman: 2013. 103) Oleh karenanya, bila di desa terjadi masalah, peran aparat desa merupakan yang paling utama untuk menyelesaikan.

Di pedesaan Banyuwangi, pada Juli-September 1998, isu dukun santet semakin marak. Dukun santet yang diidentikkan dengan ritual pembunuhan semakin menjadi perbincangan bahkan dibumbui dengan label komunis. Di tingkat desa, kondisi ini menyulut kecurigaan antar masyarakat bahkan memicu perburuan dan pembunuhan orang-orang yang dituduh

Pembunuhan dengan isu dukun santet kemudian hadir dan menimbulkan banyak korban jiwa. Bisa dinarasikan bahwa dukun santet atau dalam istilah Banyuwangi disebut dukun sihir, dibenci sekaligus ditakuti oleh masyarakat. Dibenci karena bisa membuat orang sakit, susah sampai mati dengan cara tidak wajar. Sekalipun dibenci, banyak yang berminat menjadi dukun sihir karena selain ditakuti juga menjadi lapangan kerja. Akan tetapi, yang lebih mengesankan, orang yang tidak pernah punya ilmu santet justru dikategorikan sebagai dukun karena fitnah, dendam, atau informasi yang tidak jelas tentang labelisasi dukun sihir(santet) (Teresa Woods: 2007, 154-175).

Pada awalnya, pembunuhan yang terjadi pada Juli-Agustus 1998 ditengarai sebagai aksi pembunuhan murni. Pelaku aksi merupakan masyarakat sekitar yang mempunyai hubungan secara langsung dengan korban. Tatkala pembunuhan memuncak pada September, masyarakat menengarai ada konspirasi yang menyelip dalam setiap pembunuhan yaitu orang-orang terlatih (Aminudin Kasdi: 1999. 90).

Di wilayah yang banyak terdapat korban kekerasan dengan dukun santet, peranan aparat desa sangat lemah bahkan tidak berdaya dengan aksi brutal masyarakat. Seperti di Kecamatan Rogojampi, dalam catatan TPF-NU terdapat 19 korban jiwa (TPF Banyuwangi), peran aparat sangat lemah dan hanya dijadikan alat pembenaran atas kasus pembunuhan. Peran aparat di desa-desa yang banyak terdapat korban rupanya hanya dijadikan alat pembenaran untuk pembunuhan, sebelum terjadi pembunuhan, aparat desa sering didatangi pelaku untuk meminta izin terhadap pengusiran orang yang diduga tukang santet, namun nyatanya korban di bunuh. Aparat desa hanya dijadikan simbolitas atas pembunuhan. (Latif Kusairi: 2015. 243) Kasus ini seperti yang terjadi dalam pembunuhan dengan korban atas nama Sulaiman, warga Dusun Pandarungan, Desa Kaligung, Kecamatan Rogojampi. Pada malam hari sekitar pukul 22.00 WIB, Sulaiman dibawa oleh para pelaku kerumah *kamituwo* Musairi di dusun Pandarungan. Tujuannya adalah adanya ketegasan *kamituwo* Musairi untuk mengusir ataupun memberikan pengadilan kepada Sulaiman (*Jawa Pos*, 27 September 1998). Akan tetapi, berhubung *kamituwo* Musairi berada di luar kota, tidak ada penegakan hukum, kemudian pembunuhan terhadap Sulaiman pun terjadi (Arsip pengadilan Negeri Banyuwangi. Perkara

nomor No Reg. Perk: PDM-482/EPO/BWI/02/1999.) Kasus pada pembunuhan yang terjadi terlebih dahulu dibawa ke *kamituwo* merupakan bentuk bagaimana aparat bisa dijadikan penanda atas legitimasi keabsahan perilaku kekerasan. Pada kasus Sulaiman, aparat desa menjadi tertekan, karena mendapat perlawanan dari rakyatnya untuk mengadili. Disisi lain, ketidakmampuan aparat desa untuk mengendalikan situasi dimaknai warganya sebagai restu pembunuhan.

Kejadian serupa juga terjadi pada kasus pembunuhan Ashari. Sebelum dibunuh dan ditemukan meninggal dengan kondisi tergantung di Jembatan Kalong (Wawancara KH Abdul Fatah: 21 Desember 2014), para pembunuh berkumpul di balai desa untuk melakukan kumpulan(rapat) secara illegal (Jawa Pos, 26 September 1998) Peradilan dihadapan sebuah simbol pemerintah lokal juga terjadi di Desa Tambong Krajan, Kecamatan Kabat. Korban H. Samsul Hadi yang diduga mempunyai ilmu santet, tewas tergantung di halaman balai desa Tambong (Jawa Pos, 27 September 1998). Meskipun aparat kepolisian dan aparat desa sudah menghalangi rupanya tidak bisa mencegah massa. Kejadian ini juga sama dengan pola pembunuhan Sidik yang merupakan takmir masjid di desa Pakel kecamatan Glagah (Jawa Pos, 27 September 1998)

Di tingkat pedesaan, tampaknya ada pembicaran dalam setiap pembunuhan, karena tidak adanya upaya pencegahan. Aparat desa yang seharusnya melakukan penjagaan untuk mengantisipasi pembunuhan, tidak pernah hadir untuk mencegahnya. Babinsa yang notabene nya adalah kepanjangan dari aparat keamanan di tingkat desa, kurang mendapat simpati lagi dari masyarakat. Peran Babinsa yang begitu penting pada masa Orde Baru, tiba-tiba hilang ketika masa reformasi, Babinsa hanya digunakan untuk alat kelengkapan aparatur desa saja. Bila ada warga desa yang terbunuh oleh *Gantung*, Babinsa dan aparat kepolisian datang dan menganggap hal itu sebagai sebuah musibah bagi keluarga korban.

Bukti lain yang mengindikasikan bahwa aparat semacam Babinsa terlibat pembunuhan terjadi pada kasus Humaidi, warga Dusun Pakisplampang Kelurahan Pakis Kecamatan Banyuwangi, rumahnya hancur dirusak massa meskipun Humaidi sendiri berhasil lolos dari amuk massa. Keluarga Humaidi kemudian melaporkan kasusnya ke Dandim sambil menyebutkan nama Sukron (oknum

Babinsa) dan Sugiyat (Intel Kodim) sebagai orang yang ikut aksi atas kasus perusakan. Hal itu didasarkan fakta bahwa sebelum perusakan terjadi rapat secara sembunyi-sembunyi yang dihadiri oleh kedua oknum dan mengatakan bahwa pembunuhan itu merupakan perintah dari Dandim Banyuwangi. Tepat pada tanggal 25 September 1998 pukul 19.30 WIB, kedua tentara itu didampingi 10 orang penggerak menuju rumah Humaidi dan menyerangnya. Karena Humaidi tidak ada maka mereka melakukan perusakan rumah. Kejadian inipun mirip dengan peristiwa di Kecamatan Rogojampi. Ada indikasi keterlibatan seorang aparat kodim bernama Guritno dan seorang yang berinisial IM dari aparat polisi (Wawancara Muchlisin, 11 Mei 2014).

Peristiwa yang terjadi di waktu itu merupakan bentuk ketidakberdayaan aparat desa untuk mengantisipasi massa. Membunuh dan menggantung di depan balai desa dianggap telah disetujui aparat desa. Fakta lain adalah temuan pembunuhan Mateha, kepala desa diduga turut merestui untuk membunuh (Latif Kusairi: 2015. 304)

Meski tidak semua aparat desa tidak berdaya untuk menghalau massa, antara bulan Juli-September 1998 di desa-desa sering didatangi massa dan gerombolan orang bertopeng. Masuknya isu pembunuhan dukun santet tidak bisa serta merta aparat untuk menghimbau masyarakatnya agar tidak terpancing provokasi. Faktor lain adalah tidak tegasnya pihak kepolisian dalam menindak lanjuti massa yang membunuh sehingga pembunuhan massal dengan memanfaatkan aparat desa sebagai simbol keabsahan pembunuh pun terjadi. Kelompok-kelompok masyarakat yang pada Orde Baru mengalami tekanan dan tidak berdaya menjadi menguat dan mengambil alih kekuatan negara yang disimbolkan oleh aparat negara. Akibatnya, pemerintah yang dalam hal ini diwakili desa sebagai bagian pemerintah paling bawah, menjadi kurang berdaya terhadap tuntutan-tuntutan masyarakat.

Peran aparat desa tidak semuanya lemah di Banyuwangi, beberapa tempat tampak ada ketegasan dari aparatnya. Selain didukung oleh aparat yang tegas, kondisi ini dipengaruhi pula oleh kepatuhan masyarakat akan himbuan perangkat desa supaya tidak terprovokasi isu santet. Hal ini terlihat seperti di Kecamatan Jajag yang tidak terdapat korban pembunuhan dengan isu santet. Masyarakat

Jajag yang mayoritas Jawa, sangat patuh terhadap pemimpinnya yaitu pemimpin formal seperti aparat desa (Wawancara Ainur Rofiq, 8 Mei 2014)

Memasuki bulan Oktober 1998, masyarakat mulai mencurigai aksi pembunuhan yang dilakukan oleh massa dan gerombolan orang bertopeng atau *Gantung*. Kecurigaan tersebut ditanggapi oleh aparat desa yang menggerakkan warganya untuk melakukan Siskamling, yaitu dengan sistem Pam Swakarsa. Pada bulan ini aparat desa yang tadinya sangat defensif terhadap masuknya orang asing di desanya mulai aktif untuk melakukan penjagaan. Pada 1 Oktober 1998, himbuan bupati, kepolisian dan Pangdam V Brawijaya agar masyarakat turut memperkuat keamanan melalui Siskam-Swakarsa, dipatuhi dan disiarkan oleh aparat desa (*Jawa Pos*, 2 Oktober 1998). Sejak saat itulah, desa menjadi bersinergi dengan pemerintah dalam upaya pencegahan kekerasan melalui pengamanan swakarsa. Perubahan sikap masyarakat yang tadinya bersahabat dengan para pembunuh atau *Gantung* dan beralih untuk memusuhinya tidak lepas dari peran aparat desa yang mendapat himbuan dari aparat keamanan. Hal ini dikarenakan para pembunuh bukan lagi dari desa tersebut, tetapi sudah berasal dari luar desa yang sengaja (di)datang(kan) untuk membunuh orang yang dituduh dukun santet (*Kompas*, 2 Oktober 1998). Pengamanan desa bertambah seiring dengan bantuan yang dilakukan oleh pihak keamanan. Hampir setiap satu jam sekali, aparat kepolisian berkeliling desa untuk mengecek dan melakukan pengamanan bersama masyarakat.

Di lain sisi, aktivitas tersebut mendorong masyarakat menambah poskamling di setiap gang desa dan membangun barikade di ujung gang bahkan hampir setiap 50-100 meter. Di samping itu, pengamanan pun dilakukan dengan pemberlakuan jam malam sejak pukul 21.00 WIB. Gambaran selengkapnya akan kondisi tersebut dapat disimak dalam *Kompas* tanggal 6 Juni 1998 berikut ini.

Warga kampung berjaga-jaga penuh ketegangan seraya menghunus senjata tajam, kayu yang diruncingkan, atau senjata tumpul lain. Isu munculnya orang bertopeng terus terdengar. Cerita-cerita tertangkapnya orang bertopeng, namun berhasil meloloskan diri beredar dari mulut ke mulut. Lalu lintas kendaraan bus dan truk pada malam hari praktis terhambat, baik dari arah Jember maupun dari

Situbondo. Namun, berita ditemukan orang tewas akibat pembunuhan telah terhenti (*Kompas*, 5 Oktober 1998).

Ada peningkatan penjagaan di Banyuwangi juga mengganggu perekonomian maupun politik. Terkait dengan perekonomian, *sweping* yang dilakukan terhadap truk-truk pengangkut Sembako dari Jawa menuju Bali atau Nusa Tenggara tidak hanya menakutkan bagi sopir-sopir truk melainkan juga menghambat kelancaran distribusi. Selanjutnya, terkait dengan aktivitas politik, peningkatan penjagaan di Banyuwangi menyulut kekhawatiran kader PDIP jikalau kondisi di Banyuwangi tersebut mempengaruhi keamanan kongres PDIP yang akan dilaksanakan di Bali pada tanggal 10 Oktober 1998 (Wawancara dengan K.H. Ikcwan, 15 Mei 2014)

Sikap aktif masyarakat terhadap pembunuhan ini cukup membuat upaya kasus santet juga cepat terselesaikan. Sekitar dua bulan keberadaan warga yang melakukan Poskamling, setelah itu sudah jarang dilakukan, hal ini mengindikasikan bahwa keamanan desa terhadap aksi kekerasan sudah tidak terjadi. Peran aparat desa yang tadinya sangat pasif menjadi proaktif, dikarenakan adanya stabilitas dan kerjasama dari pemerintah pusat. Kehadiran aparat desa pada waktu-waktu akhir ini, dikarenakan lemahnya aparat waktu itu, dan baru ada komando setelah isu dukun santet mendapat perhatian luas dari pemerintah pusat dengan melakukan komando pengamanan di Banyuwangi (Arif Subekti dan Latif Kusairi:2018)

Dari penjelasan tersebut pola yang terjadi dalam penulisan sejarah adalah memandang lewat data data Pengadilan. Sehingga yang terjadi pola inilah yang kemudian menjadikan data sejarah yang cukup menarik lewat pola dan penulisan dari data pengadilan.

KESIMPULAN

Dalam kajian Sartono Kartodirjo, bahwa sejarah adalah yang bersifat menyeluruh. Sejarah senantiasa untuk mengkaji segala hal yang berkaitan masa lalu, bila hal ini tidak bisa dilakukan dengan pendekatan satu dengan pendekatan yang lainnya. Oleh karenanya pola multidimensional approach bisa dilakukan.

Prinsip kesejarahan Indonesia-sentris bukanlah sebuah landasan teori, yang bergumul dengan masalah historical causality (sebab-akibat dalam sejarah) dan sebagainya, tetapi hasrat normatif untuk memahami corak dan bentuk dinamika kehidupan bangsa dalam rentangan perjalanan waktu.

Pencarian sumber primer menggunakan wawancara terhadap pelaku atau saksi, foto masa pada kejadian pembunuhan, Arsip Daerah Jawa Timur, Arsip Pengadilan Negeri Banyuwangi, Arsip Pengadilan Tinggi Surabaya, Arsip PWNU Jawa Timur, dan Arsip TPF DPR-RI. Selain itu wawancara dengan korban isu santet, saksi pada kasus kekerasan isu santet dan tokoh masyarakat yang mengetahui pada kasus kekerasan santet. Berita dari surat kabar dan majalah bisa dijadikan sumber primer karena bisa menggambarkan secara kronologis rentetan pembunuhan yang terjadi. Sumber sekunder dapat dicari dalam buku penunjang, hasil penulisan dan karya tulis yang menuliskan kondisi kekerasan dan pembunuhan tersebut.

Penulisan sejarah dengan menggunakan data kepolisian, pengadilan dan data lain yang bersifat kontemporer setidaknya mulai dipikirkan oleh para sejarawan. Penulis harus pandai menjemput data yang ada tidak hanya mengandalkan arsip-arsip yang ditampilkan di kantor arsip saja. Akan tetapi seiring perkembangan waktu. Bisa saja dalam kajian yang bersifat *expost factum* yang kejadian dan peristiwa yang akan ditulis belum begitu lama, menggunakan data lewat kehadiran penulis melalui sidang-sidang peradilan. Hal ini dimungkinkan karena keterbatasan akses seorang penulis untuk bisa langsung mewawancarai pelaku kekerasan tersebut.

Pengetengahkan data-data yang telah ada di Arsip, Bukti Acara Penyelidikan dari Pengadilan, data TPF dan wawancara beberapa keluarga, saksi dan tokoh-tokoh Banyuwangi. Selanjutnya, menjelaskan peran negara dalam upaya untuk menghentikan kekerasan. Kemudian dilanjutkan ikhtisar atas teorema kekerasan yang terjadi Banyuwangi. Hal ini juga dijelaskan asumsi-asumsi pelaku pembunuhan dan siapa aktor dibalik kekerasan tersebut.

DAFTAR PUSAKA

Arsip

Arsip Pengadilan Negeri Banyuwangi no P-42 tentang Kesaksian Nurmal dan Jamilah dalam sidang di Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan Terdakwa Sapi'i atas pembunuhan Djamuri. 23 April 1999.

Arsip Pengadilan Negeri Banyuwangi no P-42 tentang Surat Tuntutan atas Terdakwa Sapi,i No. Reg.Perkara: PDM-473/EPO/BWNGI/02.09.

Arsip Pengadilan Negeri Banyuwangi no P-42 tentang Surat Tuntutan atas Terdakwa Sapi'i No. Reg.Perkara: PDM-473/EPO/BWNGI/02.09. no. 5. Juga wawancara dengan Bambang Suhariyanto, 12 April 2014.

Kesaksian Musairi dalam Perkara Pembunuhan Sulaiman dengan Terdakwa Rochman dkk, dalam Arsip Pengadilan Negeri Banyuwangi, Perkara nomor 416/PID.B/1998/PN.BWI. Lihat juga kesaksian Afandi dalam pengadilan terdakwa Salimi dan Bunali pada pembunuhan Kustari, dalam Arsip pengadilan Negeri Banyuwangi. Perkara nomor No Reg. Perk: PDM-482/EPO/BWI/02/1999.

Buku

Abdul Manan dkk, *Geger Santet Banyuwangi*, Surabaya: Intitut Studi Arus Informasi, 2001

Afan Gaffar, Politik Akomodasi: Islam dan Negara di Indonesia, dalam buku *Agama, Demokrasi dan Keadilan*, Jakarta: Gramedia, 1993.

Aminudin Kasdi, "Kasus Dukun Santet di Jawa Timur "dalam Kumpulan makalah Diskusi Sejarah Lokal sub tema *Pembangkangan Sipil dan Konflik Vertikal II*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2001.

Anderson, Benedict, *Imagined Communities: Reflections On The Origin and Spread Of Nasionalism*, London: Verso, 1992.

Arif Subekti dan Latif Kusairi, *From Sunrise of Java to Santet of Java: Recent Urban Symbolism Of Banyuwangi, Indonesia*. 1st International Conference on Social Knowledge Sciences and Education (ICSKSE 2018).

- Campbell, Caroline and Linda H. Connor, "Sorcery, Modernity and Social Transformation in Banyuwangi, East Java", *Review of Indonesia and Malay Affairs* 34: 2000.
- Cribb, Robert, "From Petrus to Ninja: Death Squash in Indonesia", dalam B. Campbell (ed), *In Death Squash in global Perspective: Murder with Deniability*, New York: Sant Martin Press, 2002
- Deborah Barrett and Charles Kurzman, "Globalizing Social Movement Theory: The Case of Eugenics", *Theory and Society*, Vol. 33, No. 5 Oktober 2004.
- Gurr, Ted Robert, *Minorities at Risk: A Global View of Ethnopolitical Conflicts*, Washington, DC: The United States Institute of Peace Press, 1993.
- Herriman, Nicholas, *Negara vs Santet*, Jakarta: Pustaka Obor, 2013.
- Latif Kusairi, *Ontran-ontran Demokrasi Kekerasan dengan Isu Dukun Santet di Banyuwangi, 1998-1999* (Tesis UGM 2015)
- Retsikas, Kontantinos. *The Semiotics of Violence Ninja, Sorcerers, and State Terror in Post-Soeharto*, Leiden: KITLV, 2006.
- Woods, T. (2007). *Magic, Morality And Medicine: Madness And Medical Pluralism In Java*. Washington: University of Washington.

Koran, Majalah, Website dan Wawancara

- "Operasi Naga Hijau dan pembunuhan Guru Ngaji di Jawa Timur, 1998", dalam
<http://www.nu.or.id/> Diakses 03 Mei 2015, jam 18.12 Wib.
 Korban kekerasan dalam kasus Banyuwangi oleh TPF-NU Cabang Banyuwangi
- "Malam Batal Sumpah Pocong, Esoknya Tokoh itu Digantung", dalam Jawa Pos, 27 September 1998.
- "Mantan Takmir dan Guru Ngaji pun Dibantai", dalam Jawa Pos, 28 September 1998
- "Pandam V: Kemanan Swakarsa tak Jalan", dalam Kompas, 2 Oktober 1998. Lihat juga, "Banyuwangi Tak Ada Solusi?", dalam Jawa Pos, 2 Oktober 1998.
- "Pandam V: Keamanan Swakarsa Tak Jalan", dalam Kompas, 2 Oktober 1998.

“Banyuwangi Masih Mencekam, 116 Ditahan”, dalam Kompas, 5 Oktober 1998.

Wawancara

Wawancara dengan K.H. Ihcwan, 15 Mei 2014.

Wawancara KH Abdul Fatah: 21 Desember 2014

Wawancara dengan Ainur Rofiq, 8 Mei 2014

Wawancara dengan Bambang Suhariyanto, 12 April 2014

Wawancara dengan Muchlisin, 11 Mei 2014).